



Buletin Parlementaria

Nomor 1058/IV/VI/2019 • Juni 2019

Halal Bihalal

PIMPINAN DPR RI DENGAN KARYAWAN
SETJEN DAN BK DPR RI

*"Melalui Halal Bihalal Kita Ciptakan
Pusat yang Berakhlak Mulia"*

8 Juni

**DPR Minta Masyarakat
Kembali Eratkan Tali
Persaudaraan**



9 772614 339005



5 Komisi I Dukung RRI
Tingkatkan Layanan
Informasi



10 Komisi III Kuatkan Peran
Pemasyarakatan dengan
Revisi UU Pemasyarakatan

DPR Minta Masyarakat Kembali Eratkan Tali Persaudaraan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh elemen bangsaempererat tali silaturahmi untuk mengukuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sangat penting mengingat situasi masyarakat yang masih terbelah pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurutnya, sebagai akibat dari perbedaan pilihan dalam Pemilu, dinamika politik dalam masyarakat berlangsung dalam tempo yang cukup menegangkan.

“Seolah-olah tidak ada lagi rasa persahabatan dan persaudaraan sesama anak bangsa. Saya mengajak kepada para elit dan semua elemen bangsa untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,” ujarnya dalam acara Halal Bi Halal bersama seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kembali membangun kebersamaan, memperkuat persaudaraan serta menyerahkan semua perselisihan Pemilu kepada mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, terlalu mahal harga yang harus dibayar jika perbedaan politik dalam pemilu harus mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menambahkan, silaturahmi dan halal bi halal merupakan salah satu tradisi keagamaan umat Islam Indonesia yang tidak dijumpai di negara-negara lainnya. Sebagai khasanah budaya, tradisi halal bi halal harus terus ditumbuhkembangkan.

“Atas nama pribadi dan sebagai Pimpinan Dewan dengan tulus saya



Pimpinan DPR RI Halal Bi Halal bersama seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Foto: Odjie/OD

menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa,” tutur Bamsuet.

Di akhir pidatonya, Bamsuet berpesan agar semua pihak bisa mengisi hari-hari setelah Ramadan dengan meningkatkan ibadah dan berbuat kebajikan bagi sesama. Tidak ada istilah libur dalam beramal sholeh, tidak ada istilah pensiun dalam beribadah, dan tidak ada istilah cuti dalam berbuat kebaikan. Semua itu dilakukan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Khusus bagi keluarga besar DPR RI, kita berada dalam bulan-bulan terakhir masa bakti DPR Periode 2014-2019. Marilah kita hiasi kerja-kerja kedewanan kita dengan kinerja dan prestasi yang membanggakan, sebagai *legacy* dan warisan untuk kemajuan bangsa dan

negara,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah VII ini.

Turut hadir dalam halal bi halal ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Rumah Tangga Utut Adianto, dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.

Selain itu, nampak juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing, Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti, Wakil Ketua BURT DPR RI Nurhayati Monoarfa, serta Anggota BURT DPR RI Refrizal. Dari jajaran Kesenjangan, hadir Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha, Deputi Persidangan Damayanti, pejabat Eselon I, II, III, dan ratusan karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. ■ [ann,rnm/sf](#)

Kehadiran BAKN Kian Kuatkan Pengawasan DPR

Seiring hadirnya kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, pengawasan yang dilakukan DPR RI terutama menyangkut keuangan negara diharapkan semakin kuat. Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menilai, banyak temuan penyalahgunaan keuangan negara yang berulang kali dilakukan, tapi kurang mendapat perhatian serius.

“Kami ingin badan baru ini betul-betul menjadi badan yang kuat, bukan badan yang dulu dipertanyakan mengapa sempat tidak ada. Jadi, penguatannya harus konkret. Mudah-mudahan fungsi pengawasan ke depan yang selama ini belum optimal, dengan ada BAKN ini makin kuat,” harap Utut saat pertemuan dengan jajaran BAKN DPR RI yang dipimpin ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Sementara itu, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam laporannya kepada Wakil Ketua DPR RI menyampaikan, selain melaporkan kinerja yang sudah dilakukan BAKN, dalam masa sidang ini BAKN juga akan menyampaikan audit tematik berupa Dana Desa. Kemudian pengelolaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sampai 2018 juga jadi materi yang dilaporkan ke Pimpinan DPR RI.

“Kita masuk ke temuan-temuan yang sifatnya berulang. Ada di penerimaan negara bukan pajak maupun di perpajakan. Mengenai afirmasi Dana Desa, kita telah mengadakan rapat dengan Kemenkeu, Kemendes PDDT, BPKP, dan Kemendagri untuk membahas hal ini. Hasil-hasil dan rekomendasinya sudah disampaikan. Kita akan buat laporan detailnya pada Rapat Paripurna dan dibagikan ke seluruh Anggota DPR,” jelas Andreas.

■ mh/sf



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat pertemuan dengan jajaran BAKN DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/OD



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Purno Pranowo, Singgih Kinanti Rimhani, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alayudus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,
Geraldii Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintah. Karena guna menjaga prinsip *check and balances* dalam demokrasi. Meski demikian, ia belum melihat ada tanda-tanda DPR RI yang semakin kuat. Bahkan, belakangan ini muncul kebijakan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memangkas anggaran DPR RI hingga Rp 2 triliun.

Hal itu ditegaskan Fahri saat menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi bertema “UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen” di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/6). Turut hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (F-PG), Anggota Komisi

XI DPR RI Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan), dan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam.

“DPR RI seharusnya memiliki anggaran yang otonom, yang pengaturannya tidak dilakukan oleh eksekutif. Karena sistem kerjanya berbeda dengan eksekutif. Pegawai DPR juga sama. Bahkan saya pernah ditinggal oleh staf saya saat kunjungan di dapil. Karena staf harus tunduk pada peraturan yang dibuat eksekutif. Jika dijadwalkan kunjungan 3 hari, maka harus pulang saat itu juga. Sementara saya sebagai legislator banyak tugas yang tak terkirakan saat kunjungan ke daerah,” ungkap Fahri.

Seharusnya, imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menjadi perhatian bagi pemerintah, guna memperkuat demokrasi dan keparlemenan

Indonesia. Khusus untuk DPR RI periode mendatang, Fahri menilai ke depan tidak akan terlalu banyak gejolak dalam pemilihan posisi Ketua DPR RI, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Karenanya, ia berharap Anggota DPR RI lah yang seharusnya bisa bersikap kritis.

“Makanya saya berharap Anggota DPR-nya yang agak *liar*, karena kalau anggotanya semuanya diatur itu susah. Agregasi daerah yang itu tidak nampak. Sebagai implementasi dari ikhtiar kita membangun sistem perwakilan yang lebih konkret. Ke depannya DPR harus betul-betul diberi ruang untuk kritis,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Namun, nampaknya hal itu belum disadari oleh pemerintah. Bahkan, sejarah Indonesia telah mencatat bahwa rezim akan runtuh bila legislatifnya lemah. Orde lama dan orde baru telah menunjukkan sejarahnya. “Bahkan penting untuk kita membangun alun-alun demokrasi. Supaya orang demo tidak lagi di Bundaran HI, itu *bikin* macet. Tapi buat ruang di DPR. Jika ada demo berarti ada tanda bahwa ada yang salah,” ungkap Fahri. ■ *hs/sf*



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada diskusi Forum Legislasi bertema “UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen”. Foto: Odjie/OD

Komisi I Dukung RRI Tingkatkan Layanan Informasi

Pagu indikatif anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020 mendatang diusulkan sebesar Rp 1,31 triliun, dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 27 miliar. Adanya kenaikan anggaran itu akan diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan informasi, salah satunya dengan menimbulkan semangat budaya untuk *aware* terhadap program kebencanaan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menjelaskan, diharapkan RRI mampu memberikan *early warning system* bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dini, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi bencana berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh RRI dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atau institusi terkait lainnya.

“RRI harus bisa menjadi media rujukan, terutama terhadap program-program pemerintah. Kalau tambahannya untuk program kebencanaan, saya pikir masih *inline* dengan program Pemerintah. Makanya kita tidak mengurangi dan menyetujui usulan tambahan yang disampaikan. Karena kita tahu program itu bagus dan kita harap usulan tambahan itu bisa disepakati,” ujar Satya usai RDP dengan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP RRI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Dalam RDP ini, RRI mengapresiasi Komisi I DPR RI yang pada rapat sebelumnya memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memperhatikan usulan anggaran

terkait pemenuhan sarana dan prasarana RRI. Oleh karena itu, usulan anggaran sebesar Rp 1,31 triliun ini, nantinya akan diperuntukkan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp 293 miliar, dan Program Pengelolaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik sebesar Rp 1 triliun.

Berkaitan dengan hal teknis, Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo Notodiprojo mengapresiasi upaya RRI untuk terus mengikuti *trend* teknologi berbasis publik dengan memperluas penyebaran siarannya melalui media *multiplatform*. Dengan telah meluncurkan RRI *Play Go*, Komisi I DPR RI berharap RRI dapat menjangkau masyarakat pada abad digital yang telah bergeser dengan tidak hanya mendengarkan radio analog, tapi juga bisa mendengarkan siaran digital radio melalui *smartphone*.

“Kami memberikan masukan dan memberikan pengawasan terhadap mitra kami agar mereka sadar posisinya bahwa sekarang ini, orang harus bisa mendengarkan radio di mana saja mereka berada,

Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Satya Widya Yudha.
Foto: Geraldi/OD



karena bisa diakses tidak hanya melalui radio melalui *gadget* atau sarana lain. Untuk itu, RRI harus mengikuti zaman. Diperlukan perluasan penyebaran tidak hanya berupa audio, tapi juga berupa teks dan visual melalui aplikasinya. RRI harus mampu berkembang menjadi tangan kanan masyarakat,” jelas Roy.

Lebih lanjut, Komisi I DPR RI akan menyampaikan hasil usulan anggaran dan tambahan anggaran Pagu Indikatif LPP RRI TA 2020 yang telah disampaikan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP RRI ini kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran yang ditetapkan oleh Banggar DPR RI.

■ alw/sf

RKP Kemenkominfo 2020 Harus Fokus Pembangunan SDM Digital

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira mengusulkan bahwa Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun anggaran 2020 harus fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang digital. Hal ini ia sampaikan berkaitan melajunya era keterbukaan informasi publik serta era industri 4.0 saat ini.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo Rudiantara dan beberapa Lembaga Kuasi Publik membahas RKA K/L dan RKP 2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6). Ia melihat dalam bidang digital ini, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak tenaga, sehingga perlu disiapkan secara fokus untuk pemerintahan lima tahun ke depan.

“Saya kira wilayah ini perlu menjadi perhatian bagi Kemenkominfo untuk menerjemahkan RKP, sebagai bagian tanggung jawab kerja dari Kemenkominfo untuk memperkuat pembangunan pemerintahan lima tahun ke depan, terutama di wilayah digitalisasi yang masih kekurangan banyak tenaga,” ujar Andreas.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyarankan agar pembangunan SDM ini menjadi perhatian nomor wahid dibanding rencana kerja lainnya, agar mendapat kucuran dana yang melimpah terhadap kelanjutan pendidikan digital yang akan diberikan

”

**...KALAU SAYA
BILANG INI HARUS
DINOMORSATUKAN,
BEASISWA DAPAT
DIBERIKAN SECARA
MASIF DAN TIDAK
TEBANG PILIH,”**

kepada generasi muda Indonesia. Ia juga mendorong Kemenkominfo memperbanyak beasiswa bidang teknologi informasi.

“Saya lihat Menkominfo sudah menyiapkan sekian banyak beasiswa untuk generasi muda yang akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kalau saya bilang ini harus dinomorsatukan, beasiswa dapat diberikan secara masif dan tidak tebang pilih,” imbuh legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. ■ er/sf



Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto: Gerald/O'D

Komisi II Perjuangkan Wakada Dapatkan Kewenangan Secara Jelas



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menerima audiensi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada). Foto: Odjie/OD

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan akan terus mengawal, memonitor dan mencari solusi yang tepat agar Wakil Kepala Daerah (Wakada) mendapatkan kewenangan yang jelas. Namun demikian, Herman berpandangan, solusi tersebut bukan dengan cara merevisi Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, mengingat usia masa jabatan Anggota Dewan periode ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Mungkin revisi UU mengenai Pemerintahan Daerah bisa dilakukan di periode yang akan datang. Mengingat, masa jabatan Anggota DPR periode ini tinggal 2 kali masa sidang, berakhir pada tanggal 30 September. Tanggal 1 Oktober sudah ada pelantikan anggota baru

dan tentu akan ada reposisi baik di Komisi maupun di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya,” ujar Herman, usai menerima audiensi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Dalam audiensi yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu, Herman mengimbau, jika memungkinkan, dengan segera Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang wewenang Wakil Kepala Daerah secara lebih rinci. Namun, menurut Herman, jauh lebih penting dari itu adalah koordinasi yang terjalin dengan baik antara Forum Wakada dengan Kemendagri.

“Forum Wakada dengan

Kemendagri harus terjalin koordinasi dengan baik. Sehingga, apa yang menjadi masalah ini bisa segera dituntaskan. Tentu, juga dengan melibatkan Kementerian PAN-RB. Karena, sistem organisasi dan penggajian juga rekomendasinya dari Kementerian PAN-RB,” tandas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Sehingga, tambah Herman, kehadiran Kemendagri dan Kementerian PAN-RB dalam forum ini sebagai respon positif terhadap surat audiensi yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI, dan bertujuan untuk menghasilkan solusi yang lebih cepat dan tepat. “Persoalan ini akan terus kami kawal, sehingga para Wakil Kepala Daerah bisa mendapatkan tugas kewenangan yang dan jelas sesuai jabatannya,” pungkas legislator dapil Jabar VIII ini. ■ pun/sf

Anggaran Untuk Kebutuhan Mendesak Jangan Dikurangi

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bahwa pagu anggaran kementerian dan lembaga saat ini memang banyak mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan anggaran tersebut harus tetap juga mempertimbangkan posisi dari kebutuhan mendesak yang ada.

“Penurunan ini tentunya harus melihat dimana posisi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan mendasar, dan itu harusnya jangan dikurangi,” tegas Firman di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN dan Kepala LAN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Untuk menghadapi sistem anggaran seperti sekarang ini, sambung Firman, semua pihak harus mulai berpikir kedepan dimana posisi perencana anggaran atau tata kelola keuangan negara yang sesungguhnya menjadi domain dari Presiden.

“Presiden mempunyai kewenangan untuk menentukan besar kecilnya

anggaran. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bertugas mencari sumber uangnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur masalah anggaran ini adalah Menteri Keuangan. Ini mereduksi kewenangan Presiden. Seharusnya Presiden yang menentukan bukan Menteri Keuangan,” ucap legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Ia terkejut ketika mengetahui bahwa anggaran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) hanya senilai Rp 70 miliar rupiah. “Tugas KSP itu sangat luar biasa yakni sebagai corong atau mata telinga dari Presiden. Dengan anggaran dibatasi itu bagaimana Presiden bisa maksimal dalam melaksanakan kinerjanya. Bagaimana aparatur negara yang ada disekitar istana tersebut bisa berkerja maksimal kalau anggarannya dibatasi. Termasuk mengenai biaya anggaran untuk Kepresidenan RI 1 dan RI 2 yang jumlahnya hanya 101 miliar rupiah,” ungkapnya.

”

PENURUNAN INI TENTUNYA HARUS MELIHAT DIMANA POSISI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN YANG MENDESAK DAN MENDASAR, DAN ITU HARUSNYA JANGAN DIKURANGI.”

Ini bukanlah anggaran yang besar, lanjutnya, karena tugas Presiden sangat berat. “Kalau sistem anggarannya seperti ini maka pengendali keuangan negara itu bukan Presiden tetapi Menteri Keuangan, padahal tugas Menteri Keuangan adalah untuk mencari uang. Apa tidak ada pemikiran-pemikiran supaya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu untuk dikembalikan,” ujar Firman.

Ia menyampaikan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu masuk dalam rezim pasca reformasi, dimana ketika itu euforianya pemerintahan orde baru adalah pemerintahan yang korup, karena keuangan dikendalikan oleh Presiden. Kemudian diregulasi agar ada pengaturan keuangan negara itu oleh Kementerian Keuangan.

“Ini salah, karena di dalam konstitusi Presiden yang seharusnya memegang mandat untuk mengatur keuangan negara. Presiden harus mempunyai kewenangan penuh terhadap keuangan negara. Anggaran yang mengikuti rencana kerja, bukan rencana kerja yang mengikuti anggaran. Sebab kita ingin negara maju, oleh karenanya rencana kerja lima tahun harus terukur,” tutupnya. ■ dep/es



Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo. Foto: Oedjje/OD

Azis Syamsuddin Dilantik Jadi Ketua Komisi III



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon melantik Azis Syamsuddin menjadi Ketua Komisi III DPR RI. Foto: Jaka/OD

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon melantik Azis Syamsuddin menjadi Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan rekan satu fraksinya, Kahar Muzakir. Sebelumnya, Azis menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Rotasi alat kelengkapan dewan Fraksi Partai Golkar itu tertuang dalam surat bernomor I.1.2492/FPG/DPRRI/VI/2019. Surat ‘Penetapan Ketua Komisi III F-PG DPR RI’ yang dikeluarkan Rabu, 12 Juni 2019,” ungkap Fadli saat memimpin penetapan Pimpinan Komisi III DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Dijelaskan Fadli, Azis menggantikan Kahar Muzakir yang sebelum rotasi ini menjabat Ketua Komisi III DPR RI dan kini menggantikan posisinya di Banggar. Sebagai simbolis disetujuinya keputusan pergantian pimpinan tersebut, Fadli langsung menyerahkan palu sidang kepada Azis.

“Palu sidang ini saya serahkan kepada Pak Azis, semoga kembalinya Pak Azis menambah kinerja Komisi III dalam menyelesaikan tugas dan fungsi di akhir masa jabatan ini,” tutur Fadli sembari menyerahkan palu pimpinan dan disambut tepuk tangan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

Dalam kesempatan yang sama, Azis mengatakan kembalinya ia memimpin

”

**KITA AKAN
MENYELESAIKAN
RUU YANG SEDANG
DIBAHAS.**

Komisi III DPR RI, berkomitmen akan segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun. “Kita akan menyelesaikan RUU yang sedang dibahas. Diawali dengan rapat pimpinan dan pleno, semoga dapat diselesaikan di dua masa sidang ini,” tutupnya. ■ rnm/sf

Komisi III Kuatkan Peran Pemasyarakatan dengan Revisi UU Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di Indonesia sudah berdiri lebih dari setengah abad. Namun, sejumlah permasalahan hingga kini masih sering terjadi yang belakangan menjadi perhatian masyarakat terkait kisruh di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Komisi III ingin melakukan penguatan peran pemasyarakatan dalam system peradilan pidana terpadu dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“Sejumlah upaya sebenarnya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, praktik di lapangan ternyata menunjukkan hal yang berbeda,” ujar Erma Suryani Ranik saat memimpin *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Revisi UU Pemasyarakatan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (18/6).

Erma mencontohkan penanganan diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menjadi kewenangan Balai Pemasyarakatan (Bapas) belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum terakomodir dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ia menggarisbawahi empat poin yang berkaitan dengan Naskah Akademik revisi UU Pemasyarakatan. Pertama, sebagai hukum pelaksanaan pidana. Pada prinsipnya, hukum pidana sebagai pranata sosial dalam masyarakat. Artinya semua dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menyelenggarakan ketertiban hukum berpedoman pada hukum pidana materil, hukum pidana formil atau hukum acara, dan hukum pelaksanaan pidana.

Kedua, pemasyarakatan sebagai sistem tersendiri. Kalau selama ini pemasyarakatan dipahami sebagai subsistem dari peradilan pidana, nantinya, pemasyarakatan akan dibuat sebagai sistem tersendiri. “Belum dapat dipastikan apakah berbentuk sistem yang terintegrasi atau berbentuk *holding*. Tapi yang jelas, dalam Naskah Akademik revisi UU Pemasyarakatan peran pemasyarakatan akan lebih menonjol dalam sistem peradilan pidana,” tambahnya.

Selanjutnya, yaitu terkait dengan administrasi. Selama ini sejumlah aturan membatasi institusi dalam membuat keputusan. Misalnya terkait pemberian remisi atau pelaksanaan grasi hanya berada pada tataran keputusan yang bersifat administratif dari pelaksanaan pembinaan di Lapas.

“Padahal, terjadi perluasan peran dan tanggung jawab di pemasyarakatan untuk mengelola lembaga-lembaga baru yang menjadi perintah undang-undang seperti peran Bapas untuk pidana korporasi,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Keputusan-keputusan administratif tersebut membuat kebutuhan bagi Lapas untuk tetap berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham). Padahal, Pemasyarakatan punya andil mulai dari proses pra ajudikasi, ajudikasi, hingga *post* ajudikasi. “Tak Cuma Lapas, Bapas, Rupbasan juga akan menonjol perannya lewat revisi UU Pemasyarakatan ini,” tuturnya.

Terakhir yaitu berkaitan dengan pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang juga menjadi *concern* tim penyusun Naskah Akademik revisi UU Pemasyarakatan. “Jika proses rekrutmen untuk petugas dan pegawai di Ditjen Pas selama ini menggunakan seleksi ASN, harus dicari formula yang tepat untuk menjaring SDM yang mempunyai integritas untuk mengabdikan di pemasyarakatan,” tutupnya. ■ man/es

Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Erma Suryani Ranik. Foto: Andri/OD



Kementan Diminta Prioritaskan Infrastruktur Pertanian

Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk memperhatikan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian jika ingin mensejahterakan petani, serta meningkatkan hasil pertanian dalam negeri. Ke depan perlu adanya penataan infrastruktur pertanian.

“Agar petani ada penghasilan lebih maka infrastrukturnya juga harus bagus. Apalagi banyak terjadi bencana banjir, sehingga dibutuhkan penataan infrastruktur pertanian ke depan,” papar Fadholi di sela-sela Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementan tahun 2020 dan realisasi anggaran tahun 2019, Fadholi juga menyayangkan alokasi pagu indikatif Kementerian Pertanian yang berada di angka Rp 20,53 triliun. Jumlah ini lebih kecil daripada anggaran pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah.

Menurut politisi Partai NasDem ini, jumlah itu tidak akan mampu memperbaiki seluruh jaringan irigasi pertanian yang terdampak pasca bencana banjir. Belum lagi kekeringan lahan yang kerap melanda beberapa daerah.

“Meski iuran, petani dengan penghasilan kecil tidak mampu membuat saluran irigasi tetapi kalau



Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi. Foto: Odjie/OD

mereka kekurangan pupuk, mereka masih bisa membuat pupuk secara mandiri. Karena itu agar petani sejahtera, maka infrastrukturnya harus bagus, termasuk jalan usaha tani,” tandas legislator dapil Jawa Tengah I ini. ■ ann/sf

Legislator Dorong Tambahan Anggaran Eselon I Kemenhub

Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing mendorong penambahan anggaran di setiap Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu disampaikan Anthon, mengingat selama ini hasil kinerja Kemenhub dinilai sudah maksimal, namun anggaran yang dimiliki Kemenhub masih memprihatinkan.

“Anggaran di setiap Eselon I Kementerian Perhubungan harus ditambah, khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat,” ujar Anthon saat mengikuti Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan RKA-KL dan RKP 2020 dengan Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Di samping itu, Politisi Partai Golkar ini, mengimbau Pemerintah agar tidak boleh kalah dari sektor swasta, apalagi kepada pengusaha, terutama dalam

penetapan harga tiket pesawat. Anthon juga menyetujui masuknya maskapai perusahaan asing bisa, namun tapi melalui harus melalui seleksi yang sangat ketat.

“Jika hanya Garuda Indonesia dan Lion Air yang berkiprah, mereka akan menguasai harga, sehingga terjadi kartel. Saya setuju masuknya maskapai asing, asalkan dengan seleksi ketat. Kemenhub memiliki wewenang membahas anggaran batas bawah sampai batas atas. Komisi V juga akan berkoordinasi dengan Komisi VI untuk menjembatani Kemenhub dengan Kementerian BUMN apabila harga avtur masih mahal,” tandas Anthon.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini juga mengingatkan, Pemerintah, khususnya Kemenhub untuk mengkaji ulang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap maskapai penerbangan. Lebih lanjut, Komisi V akan membahas secara khusus dalam Raker dengan setiap Eselon I

Kemenhub.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, hal yang paling mendapat sorotan dari Komisi V DPR terhadap Kemenhub adalah diupayakannya penambahan angkutan darat, seperti kereta api (KA).

“Oleh karena itu, ada usulan untuk meningkatkan anggaran di Dirjen Perhubungan Darat. Juga, bagaimana kita berkolaborasi dengan PT. Kereta Api Indonesia untuk penambahan *rolling stock*. Sehingga, angkutan darat dan KA itu menjadi satu hal yang masif,” tutup Menhub.

■ pun/sf

Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing. Foto: Kresna/OD



Kementerian Didorong Berikan Pemasukan Devisa

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menegaskan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mampu menghadirkan pemasukan devisa yang tepat dan jelas bagi negara sehingga pemasukan negara menjadi stabil. Menurutnya, nilai ekspor Indonesia terlalu kecil, dibandingkan besaran impor. Sehingga hal ini menekan neraca perdagangan tanah air.

“Pemerintah harus jelas dalam masalah ini, terutama menjelaskan industri apa yang betul-betul bisa mendapatkan devisa yang tepat, sehingga tidak ada keluhan devisa tergerus,” tegas Teguh saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX tersebut memaparkan, salah satu penyumbang devisa terbesar bagi penerimaan negara saat ini adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Sedangkan jika dibandingkan dengan produk manufaktur Indonesia kalah saing dengan negara-negara lain.

“Ketika kita berbicara produk manufaktur, kita kalah saing dengan negara lain, terutama oleh pendatang baru seperti Vietnam. Kita juga kalah karena berbagai insentif yang mereka berikan,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Teguh berharap pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera mendapatkan solusi yang tepat dalam mendapatkan devisa negara yang besar, sehingga tidak kalah dengan negara-negara lainnya, terutama di

”

TENTU KITA MENGHARAPKAN ADANYA KEHADIRAN SEKTOR-SEKTOR YANG DAPAT MENDUKUNG PEMASUKAN DEvisa KITA DAN JUGA HARUS DIDORONG.

tengah larangan peredaran sawit Indonesia di Uni Eropa.

“Tentu kita mengharapkan adanya kehadiran sektor-sektor yang dapat mendukung pemasukan devisa kita dan juga harus didorong. Kita tahu Kementerian Perdagangan sudah bekerja luar biasa, terutama dalam menghadapi larangan sawit Indonesia di Uni Eropa,” imbuh Teguh. ■ tn/sf



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan. Foto: Arief/OD

Komisi VII Dorong PLN Mulai Kembangkan EBT

Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI mendorong PT. PLN (Persero) agar mulai mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berbasis energi ramah lingkungan. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan menyambangi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 50 Mega Watt di PLTG Teluk Lembu, Provinsi Riau yang dioperasikan oleh PLN.

“Kami melihat proses pengelolaan lingkungannya cukup baik. Tidak ada polusi lingkungan yang ditimbulkan. Hal tersebut karena yang mereka digunakan adalah gas. Dan kita harapkan ke depannya PLN dapat mengembangkan energi berbasis ramah lingkungan, seperti Energi Baru Terbarukan (EBT). Jadi kita sudah harus mulai untuk meninggalkan energi yang berbasis fosil,” ucap Ridwan di Pekanbaru, Riau, Kamis (13/6).

Memang tidak bisa dilakukan secara langsung, sambungnya, melainkan harus bertahap. “Terutama di daerah Sumatera. Yang memprihatinkan, di Provinsi Riau belum seratus persen masyarakat dapat menikmati energi, khususnya listrik. Padahal Riau sendiri merupakan provinsi yang berpotensi menghasilkan energi yang cukup besar,” ujar Ridwan.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, salah satu hal yang menjadi kendalanya karena di wilayah Riau banyak parit-parit. Oleh karena itu, penyelesaiannya PLN harus menggunakan EBT, seperti energi surya, energi angin, atau energi panas bumi. Hal ini untuk memberikan solusi bagi daerah yang tidak bisa dialiri oleh pembangkit.

“Ini menjadi tugas pemerintah.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memimpin Tim Kunspek Panja Limbah dan Lingkungan tinjau PLTMG 50 Mega Watt di PLTG Teluk Lembu, Provinsi Riau. Foto: Dewi/OD

”

TIDAK ADA POLUSI LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN. HAL TERSEBUT KARENA YANG MEREKA DIGUNAKAN ADALAH GAS.

Komisi VII DPR akan meminta kepada Menteri ESDM untuk lebih serius menangani masalah ini, agar jangan hanya masyarakat yang ada di Pulau Jawa saja yang bisa menikmati energi, tetapi daerah-daerah seperti Sumatera yang merupakan penghasil energi terbesar ternyata rakyatnya masih ada yang belum bisa menikmati aliran listrik,” kata Ridwan.

Selain itu, dalam APBN juga akan diatur mengenai bantuan bagi

masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan listrik PLN. “Jadi dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik, tetapi untuk pembayaran bulannya tetap ditanggung oleh masyarakat sendiri. Untuk tegangan listrik 450 watt, kita juga harapkan agar masyarakat Riau juga dapat dibantu. Karena anggarannya cukup banyak dan diharapkan dapat tersebar ke berbagai daerah,” imbuhnya.

Komisi VII DPR RI juga mendorong agar PLN dapat mengembangkan EBT dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). “Karena Bumdes mempunyai anggaran yang berasal dari Dana Desa. Hal ini agar masyarakat yang ada di pedesaan juga bisa menikmati listrik,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Timur V itu. ■ dep/sf

Anggaran KPPPA Turun, Komisi VIII Pertanyakan Keseriusan Pemerintah



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis. Foto: Azka/OD

Komisi VIII DPR RI menolak pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2020 yang disampaikan Menteri PPPA karena dinilai terlalu kecil, yakni sebesar Rp 236 miliar berdasar RAPBN dan RKA-RKP K/L Tahun Anggaran 2020. Jumlah ini menurun drastis sebanyak 52 persen atau sekitar Rp 257 miliar dari pagu anggaran tahun 2019 lalu. Komisi VIII DPR RI pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menganggap penurunan anggaran KPPPA tidak sejalan dengan program Pemerintah, yang salah satunya mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Dengan anggaran yang hanya berkisar Rp 236 miliar, dirinya menilai anggaran ini hanya akan cukup

untuk operasional saja, belum termasuk program-program non-operasional yang membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp 250 miliar, untuk menangani permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.

“Negara yang bagus itu, kalau sudah bagus perhatiannya terhadap ibu dan anak. Karena hampir semua kekerasan dan ketidakadilan itu yang paling merasakan adalah anak dan perempuan. Ketika kita tidak membuat anggaran yang wajar, itu bisa dikatakan sebagai pelecehan kepada anak, pelecehan kepada ibu, bahkan pelecehan kepada kementerian dan DPR,” tegas Iskan usai Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA beserta jajaran di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pengurangan pagu indikatif ini dinilai akan berdampak pada kinerja KPPPA,

serta berkurangnya target kinerja beberapa *output* termasuk *output* yang mendukung berbagai program Prioritas Nasional. Tidak hanya itu, Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Perlindungan juga tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meragukan dan mempertanyakan keseriusan dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penurunan anggaran yang dinilai paling rendah diantara semua K/L di Indonesia. Untuk itu, dirinya terus mendorong pemerintah untuk bisa menaruh kepentingan dan prioritasnya pada kementerian ini.

“Saya selalu menyampaikan bagaimana kami di Komisi VIII sangat kesulitan untuk bisa memperjuangkan adanya peningkatan anggaran karena dari Kemenkeu dan Bappenas sendiri tidak menyetujui adanya peningkatan yang signifikan. Itu yang menjadi alasan mengapa kami mempertanyakan dimana kepedulian pemerintah. Ini cukup mengkhawatirkan bagi kami, kalau tidak ada perubahan dalam anggaran,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selanjutnya terhadap alokasi anggaran ini, Komisi VIII DPR RI akan mendesak KPPPA melakukan pembicaraan ulang *Trilateral Meeting* bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas agar mengubah alokasi anggaran KPPA pada RAPBN Tahun anggaran 2020, atau minimal anggaran KPPA dikembalikan seperti Tahun Anggaran 2019. ■ alw/sf

Komisi VIII Dukung Status BNPB Jadi Kementerian

Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyepakati untuk meningkatkan status kelembagaan badan penanggulangan bencana tersebut untuk menjadi kementerian. Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak menilai, karena saat ini masih berstatus sebagai badan koordinasi, BNPB akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan peningkatan anggaran.

“Agar anggarannya tidak terganggu dengan fungsi dari kelembagaan, Komisi VIII sepakat untuk mengusulkan agar ada perubahan status dari Lembaga dalam bentuk Badan, menjadi Kementerian teknis. Apalagi Presiden sudah memberikan arahan terkait mitigasi bencana kepada BNPB dan *stakeholder* lainnya. Tentu ini menjadi kewajiban kita semua,” papar Deding saat ditemui di sela-sela RDP Komisi VIII DPR RI dengan BNPB di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (18/6).

Berdasarkan Data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB per 14 Juni 2019, bencana di Indonesia tahun 2019 mencapai angka 1.993 kejadian, dengan komponen terbesar terdapat pada bencana angin puting beliung, diikuti dengan banjir dan tanah longsor. Kepala BNPB Doni Monardo juga mengatakan, pada tahun 2018 korban bencana di Indonesia menempati peringkat pertama di dunia. Bahkan selama 19 tahun terakhir, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah korban bencana terbanyak setelah Haiti.

Dengan urgensi inilah, Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari mengusulkan perlu dikuatkannya BNPB menjadi Kementerian Bencana.

”

PENINGKATAN STATUS INI NANTINYA AKAN ADA RAPAT KHUSUS DENGAN TIM BNPB YANG SUDAH DITUGASKAN OLEH MENSESNEG UNTUK MEMBICARAKAN HAL ITU.

Hal ini didasari oleh banyaknya kendala dalam koordinasi dengan lembaga daerah dan tumpang tindih dalam penanganan kebencanaan yang membuat BNPB tidak maksimal. “Kenapa tidak sekaligus dikuatkan menjadi kementerian, sebagai lembaga yang *ultimate*, jangan *nanggung*,” pungkasnya.

Peningkatan posisi ke level kementerian ini juga dinilai akan menambah efektivitas program dan terkait dengan besarnya anggaran di RAPBN

2020. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, salah satu langkah meningkatkan anggaran adalah dengan peningkatan status kelembagaan. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat lanjutan dengan pihak-pihak terkait.

“Peningkatan status ini nantinya akan ada rapat khusus dengan tim BNPB yang sudah ditugaskan oleh Mensesneg untuk membicarakan hal itu. Apakah itu harus dengan mengubah undang-undang atau tanpa mengubahnya. Kami akan bertemu segera. Kami juga gembira BNPB sudah diminta oleh Setneg untuk membicarakan kemungkinan kenaikan status ini.

Bukan hanya ide dari DPR tapi juga dari Pemerintah,” tutup Sodik.

■ alw/sf

Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak. Foto: Azka/OD



Pelaksanaan Program Anggaran K-L Harus Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan program dan anggaran Kementerian dan Lembaga harus transparan, akuntabel, dan berdasarkan ketentuan. Daya serap yang tinggi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya diperlukan percepatan pelaksanaan kinerja dan percepatan penyerapan anggaran. Komisi X DPR ingin mengetahui perencanaan, pelaksanaan, permasalahan dan penanganannya, serta realisasi target kuartal atau semester I Tahun Anggaran 2019.

“Komisi X DPR RI meminta laporan dan penjelasan pelaksanaan dan daya serap APBN Tahun Anggaran 2018 secara komprehensif dari bulan Januari hingga Desember 2018 disertai dengan permasalahan dan penyelesaiannya. Hal ini penting sebagai rujukan untuk penyusunan maupun perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan negara,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/).

Ia menambahkan bahwa, secara khusus Komisi X juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan program unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) tahun 2018 yang dilaksanakan di beberapa Deputi, yakni Deputi Edukasi dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur Bantuan Pemerintah, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitas Hak Kekayaan dan Intelektual (HKI) dan Regulasi.

“Berdasarkan RDP Oktober 2018 lalu, Komisi X DPR RI dan Bekraf sepakat bahwa Pagu Definitif Bekraf



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto. Foto: Andrii/OD

dalam APBN TA 2019 adalah sebesar Rp 657,1 miliar. Disepakati bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat dan program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten atau kota tertentu akan memperhatikan saran, pandangan dan usul Anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan RAPBN TA 2019,” papar politisi Fraksi partai Demokrat itu.

Sementara itu, Kepala Bekraf Triawan Munaf sempat menyampaikan bahwa untuk kedua kalinya Bekraf mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Triawan berharap ditahun-tahun mendatang Bekraf tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasinya lebih baik lagi.

“Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bekraf sudah semakin baik dan menjadi lecutan kedepannya agar bisa mencapai cita-cita yang ingin diraih, yaitu Ekonomi Kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional di tahun-tahun mendatang,” ucap Triawan.

Ia mengatakan, Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan sektor ekonomi baru yang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam pembangunan ekraf adalah menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. “Untuk mewujudkan hal tersebut kehadiran pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekraf sangat dibutuhkan,” pungkasnya. ■ dep/es



Komisi X Komitmen Dukung Program Kemenristekdikti

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa Komisi X DPR RI akan mendukung Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terutama untuk terus menjalankan program-program yang bersifat membangun sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut disampaikan Sutan saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Ristekdikti M. Nasir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6). Raker ini beragendakan evaluasi pelaksanaan program dan daya serap anggaran Kemenristekdikti pada APBN 2018, pelaksanaan daya serap pada kuartal I APBN 2019, serta pembahasan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenristekdikti tahun 2020.

“Beberapa hal yang telah disampaikan yaitu daya serap APBN 2018 dan daya serap kuartal I tahun anggaran 2019. Alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 33 persen. Tinggal peningkatan anggaran beasiswa Bidikmisi dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 2020 yang perlu ditindaklanjuti,” terang legislator Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Menristekdikti M. Nasir menyampaikan bahwasanya daya serap anggaran Kemenristekdikti pada APBN 2018 secara keseluruhan realisasinya mencapai 91,36 persen atau Rp 43,2 triliun dari total pagu anggaran Rp 47,3 triliun. Realisasi serapan anggaran 2018

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Foto: Odjie/OD



lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 89,19 persen.

“Sedangkan realisasi serapan anggaran semester I 2019 cukup bagus. Adapun realisasi serapan per 12 Juni 2019 sebesar 33,76 persen dari total pagu sebesar Rp 43,085 triliun. Atau sudah terealisasi sebesar Rp 14,5 triliun. Capaian ini diatas rata-rata nasional,” pungkas Nasir. ■ es

Komisi XI Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2020

Komisi XI DPR RI akhirnya menyepakati Asumsi Makro RAPBN 2020 setelah melakukan pembahasan sejak minggu lalu, untuk digunakan sebagai acuan dalam proyeksi pembangunan di tahun mendatang. Dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Melcias Markus Mekeng, seluruh Anggota Komisi XI DPR RI menyatakan kesetujuannya terhadap asumsi ini dengan sejumlah perubahan, sebagaimana hasil pembicaraan bersama antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI.

Perubahan yang dimaksud terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diproyeksikan sebesar 5,3-5,6 persen kemudian menjadi 5,2-5,5 persen. Kemudian inflasi pada kisaran 2-4 persen dan tingkat bunga SPN 3 bulan berada di 5-5,6 persen. Selanjutnya nilai

tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.000-Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat. Sedangkan tingkat pengangguran diperkirakan menjadi 4,8-5 persen.

Kemudian pada tahun mendatang, tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5 persen hingga 9 persen. Kemudian, rasio gini ditargetkan 0,375-0,380. Lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 72,51. “Demikian hasil pembahasan kita, kita sepakati asumsi ekonomi makro RAPBN 2020,” ungkap Mekeng usai membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Saat pembahasan, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan sempat menyampaikan pendapatnya terkait kesepakatan asumsi makro RAPBN 2020. Secara keseluruhan ia sepakat dengan usulan yang diajukan Pemerintah, hanya saja rentang pertumbuhan ekonomi tidak realistis. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan untuk

mencapai pertumbuhan 5,3 persen dibutuhkan investasi senilai Rp 5.802 triliun. Sehingga Heri mengusulkan pertumbuhan ekonomi 2020 direntang 5,2 persen hingga 5,4 persen.

“Kalau memang pertumbuhan ekonomi stagnan karena berupa kerangka kita bisa serahkan, tetapi cari yang mendekati, Triwulan I saja 5,07 persen. Kita butuh Rp 5.800 triliun rasanya terlalu berat,” ujar Heri. Masukan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kesepakatan asumsi makro ini. Untuk selanjutnya, kesepakatan ini akan menjadi pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI. ■ hs/sf

Ketua Komisi XI DPR RI Melcias Markus Mekeng. Foto: Geraldi/OD



Baleg Targetkan Pencapaian 50 Persen Lebih Penyelesaian Prolegnas

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mengajak Pemerintah dan DPD RI untuk berperan aktif agar target Prolegnas 2019 bisa dicapai hingga lebih dari 50 persen. Dia pun menyadari capaian legislasi saat ini masih sangat rendah, lebih kurang 18 persen dari program yang sudah ditetapkan sebanyak 55 rancangan undang-undang.

“Kita berharap sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPR RI yang sekarang, rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang setidaknya-tidaknya bisa mencapai 50 persen lebih dari program legislasi yang sudah ditetapkan,” ungkap Arif saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun

2019 di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Untuk itu perlu ada pandangan dan sikap bersama antara DPR, Pemerintah dan DPD. Sekaligus mempertegas komitmen antara ketiga pihak tentang penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif masing-masing pihak. Hal ini juga sebagai amanat konstitusi negara dan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang MD3.

Legislator dapil Jawa Timur IV itu memaparkan saat ini perkembangan pencapaian Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2019 yang telah disahkan menjadi undang-undang. Terdapat tiga rancangan

”

YANG MASIH DALAM PENYUSUNAN DI DPR, DPD, MAUPUN DI PEMERINTAH ADA 15 RANCANGAN UNDANG-UNDANG, DAN SEDANG DALAM PROSES HARMONISASI DI DPR ADA DUA RANCANGAN UNDANG-UNDANG,”

undang-undang dan tiga rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Sedangkan yang sedang menunggu surat presiden (Surpres) ada empat rancangan undang-undang.

“Yang masih dalam penyusunan di DPR, DPD, maupun di Pemerintah ada 15 rancangan undang-undang, dan sedang dalam proses harmonisasi di DPR ada dua rancangan undang-undang,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, mewakili pemerintah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan sepakat dilakukan percepatan penyelesaian RUU prioritas tanpa mengabaikan kualitas. “Pemerintah pada prinsipnya sepakat dilakukan percepatan penyelesaian RUU Prioritas Prolegnas tahun 2019 yang menjadi kewajiban bersama-sama, antara DPR, DPD, dan Pemerintah, tanpa mengesampingkan kualitas sisi substansinya,” ujarnya. ■ eko/es



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo dengan Menteri Hukum dan HAM. Foto: Gerald/OO

Ganti Rugi di RUU Penanggulangan Bencana Perlu Kajian Mendalam

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto memberikan perhatian khusus pada Pasal 44 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Dalam pasal tersebut membahas tentang ganti rugi atas kerusakan bangunan terdampak bencana. Menurutnya pasal ini perlu kajian mendalam, karena kalau salah menetapkan, negara bisa bangkrut menanggung kerugian.

“Di Pasal 44, setiap orang berhak mendapat ganti rugi atas kerusakan bangunan yang terdampak bencana. Kalau salah menetapkan, bangkrut negara. Ini perlu didiskusikan lagi, jangan sampai negara terlalu disibukkan dengan masalah ini. Saya belum menolak, saya minta didiskusikan kembali,” papar Totok saat Rapat Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana dengan para Tenaga Ahli Baleg, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Menurutnya, kriteria ganti rugi atas kerusakan karena terdampak bencana, harus jelas. Soal izin mendirikan bangunan, apakah memenuhi syarat atau tidak, lokasi bangunan sesuai dengan aturan, konstruksi bangunan memenuhi syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan persyaratan-persyaratan lainnya.

“Misalnya, karena setiap izin bangunan itu kan terkait dengan lokasi dan lain sebagainya, kemudian sudah memenuhi persyaratan bahwa daerah itu dianggap layak untuk bangunan dan dikategorikan tidak terkena bencana

dalam skala berapa, lalu konstruksinya sudah sesuai dengan peraturan. Kalau itu terjadi kerusakan, itu masih dimungkinkan mendapat ganti rugi,” jelas Totok.

Dia pun mencontohkan seperti aturan yang berlaku di Tokyo, Jepang, jika bangunan memenuhi syarat pembangunan ada kemungkinan mendapat ganti rugi jika terdampak bencana. “Seperti di Tokyo, kalau bangunan sudah memenuhi syarat, lalu

rusak, mungkin itu bisa dapat ganti rugi, itu pun tidak 100 persen. Jadi itu banyak diskusi di sini, karena kalau tidak, ini bisa jadi pasal yang membuat negara repot. Persoalan gugat-menggugat warga negara dengan pihak negara, itu akan menjadi masalah,” pungkas Totok.

■ eko/es



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto. Foto: Azka/OD

Kahar Muzakir Kembali Pimpin Banggar DPR



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyerahkan palu kepada pimpinan Banggar terpilih. Foto: Jaka/OD

Fraksi Partai Golkar kembali melakukan rotasi pimpinan untuk posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Posisi Ketua Banggar DPR RI yang saat ini dipimpin Azis Syamsudin, kini kembali dijabat oleh Kahar Muzakir. Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto memimpin proses pelantikan rotasi pimpinan tersebut.

“Saya menanyakan paket pimpinan, dalam hal ini Ketua Badan Anggaran dari unsur Fraksi Partai Golkar, semula saudara Azis Syamsuddin digantikan saudara Kahar Muzakir. Apakah dapat disetujui?” tanya Utut kepada Anggota Banggar DPR RI yang hadir di ruang rapat Banggar, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

”

...KAHAR MUZAKIR SELAKU KETUA BANGGAR DPR RI YANG BARU, DIPERKENANKAN UNTUK MENDUDUKI KURSI PIMPINAN DAN DILAKUKAN PENYERAHAN PALU SIDANG DARI UTUT KEPADA KETUA BANGGAR YANG BARU, KAHAR MUZAKIR.

Pertanyaan itu pun dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Banggar DPR RI yang hadir. Dengan telah disetujuinya pergantian pimpinan ini, Kahar Muzakir selaku Ketua Banggar DPR RI yang baru, diperkenankan untuk menduduki kursi pimpinan dan dilakukan penyerahan palu sidang dari Utut kepada Ketua Banggar yang baru, Kahar Muzakir.

Dengan demikian, lanjut Utut, kini susunan Pimpinan Banggar DPR RI terdiri dari Ketua Banggar dijabat Kahar Muzakir (F-PG), dengan Wakil Ketua Banggar, yakni Said Abdullah (F-PDI Perjuangan), Teuku Riefky Harsya (F-PD), Ahmad Riski Sadig (F-PAN) dan Jazilul Fawaid (F-PKB). Sebelumnya, Kahar Muzakir menjabat Ketua Komisi III DPR RI. ■ hs/sf

Setjen DPR dan Kementerian Sepakat Percepat Penyelesaian RUU

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerapkan sistem jemput bola dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) sebelum masa jabatan Anggota Dewan periode 2014-2019 berakhir. Sistem jemput bola tersebut diusulkan langsung oleh Pimpinan DPR RI dengan tujuan mempercepat penyelesaian RUU yang sudah sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Indra usai memimpin Rapat Koordinasi Setjen dan BK DPR RI dengan sejumlah Setjen Kementerian dan Lembaga untuk membahas langkah-langkah dalam mempercepat penyelesaian

RUU antara DPR RI dengan Pemerintah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

“Dengan sisa waktu yang ada, Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi meminta kami dari Setjen dan BK DPR RI untuk mengonfirmasikan kepada kementerian-kementerian di level teknis yaitu pada tingkatan Sekjen, Deputi, dan Dirjen terkait (pembahasan RUU) apa yang masih kurang pas dan masalah apa saja yang perlu untuk dilakukan klarifikasi saat ini,” ujar Indra.

Adapun produk legislasi yang akan fokus untuk dapat disahkan dalam satu hingga dua masa sidang ke depan diantaranya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP), RUU Pemasarakatan, RUU Ekonomi

Kreatif, RUU Perkoperasian, serta RUU Karantina Hewan dan Tumbuhan. Indra menjelaskan, Badan Keahlian DPR akan menyampaikan kepada Komisi, Panitia Kerja (Panja), dan Panitia Khusus (Pansus) jika ada substansi-substansi dari RUU tersebut yang memang perlu dijembatani.

Ia juga menyampaikan beberapa hambatan dalam pembahasan RUU, diantaranya masih adanya pasal-pasal yang perlu disamakan pembahasannya antara DPR dengan Pemerintah. Tak hanya itu saja, aspek kelembagaan turut menjadi penghalang. Sebab, setiap RUU yang akan disahkan menjadi UU memiliki konsekuensi mendirikan lembaga baru dan tentunya akan sangat membebani keuangan negara.

“Dari beberapa RUU yang disebutkan tadi, ada yang sudah bisa diselesaikan sebelum masa sidang ini (bulan Juli), ada juga yang pembahasannya masih cukup jauh. Diperkirakan sebelum akhir masa jabatan atau sekitar bulan September bisa dipastikan sudah selesai. Seperti RUU Perkoperasian, sudah dijelaskan bahwa Kemenkop UKM dan Komisi VI sudah mempunyai jadwal pembahasan dan akhirnya pun sudah ada,” terang Indra.

Setjen dan BK DPR RI akan kembali mengadakan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga lainnya pada Rabu, 19 Juni 2019. Rakor itu akan mengundang 17 kementerian dan lembaga itu guna membahas delapan RUU lainnya yang sedang diupayakan oleh DPR untuk diselesaikan sebelum masa jabatan periode 2014-2019 usai. ■ nap/es



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin Rapat Koordinasi dengan sejumlah Setjen Kementerian dan Lembaga.
Foto: Arief/OD

Ittama DPR Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan, sesuai amanat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Inspektorat Utama DPR RI telah menetapkan dua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) dan Biro Persidangan II, sebagai Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sehingga, Ittama DPR RI terus memberikan pendampingan kepada dua unit kerja tersebut dengan membangun sistem yang diukur melalui 6 area perubahan RB.

“Jadi 6 area perubahan itu yang mereka bangun. Dan tentu kita sudah melakukan pendampingan agar bagaimana mereka bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi pertanyaan dan menjawab pertanyaan, sekaligus eviden yang harus dipenuhi oleh Biro KSAP dan Biro Persidangan II DPR RI,” katanya usai membuka acara Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menuju WBK dan WBBM, di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/6).

Totok, biasa Setyanta Nugraha disapa, menambahkan bahwa syarat untuk menjadi zona integritas menurutnya harus ada penilaian dari tim penilai internal. Namun tim penilai internal sendiri merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan oleh Ittama DPR RI. Untuk itulah Ittama DPR RI perlu masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku pengawas integritas DPR RI, terkait

parameter dan tolok ukur yang dijadikan acuan dalam memberikan nilai bagi unit kerja yang dijadikan zona integritas.

“Yang kedua, kita juga meminta *benchmark* atau *best practices* di kementerian dan lembaga yang telah melakukan atau yang telah membentuk tim penilai internal, tentang bagaimana mereka mekanisme kerjanya. Dan sudah disampaikan, sehingga kita sudah bisa memberikan gambaran bagaimana untuk melakukan sebagai tim penilai internal,” kata Totok.

Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Desmarwita mengatakan, Zona Integritas tidak hanya berupa dokumen, tetapi harus implementasi daripada pertanggungjawaban tersebut. Sehingga, bagaimana setiap area di unit kerja tersebut dapat mengimplementasikan zona integritas, dan manajemen perubahan yang dapat

merubah *mindset* dan *culture set* di instansi tersebut.

“Itu ada pada pengawasannya, kinerjanya, dan kemudian manajemen perubahan. Bagaimana mereka merubah *mindset* dan *culture set*, kemudian di pengawasan bagaimana anti korupsinya ditanamkan kepada setiap pegawai. Anti korupsinya itu yang sebetulnya dilihat,” tandas Desmarwita. ■ ndy/sf



Inspektur
Utama DPR RI
Setyanta Nugraha.
Foto: Hanum/OD

DPR Dorong Adanya Keterbukaan Komunikasi Pemerintah China

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Fahri Hamzah mendorong adanya keterbukaan komunikasi dari Pemerintah China kepada negara-negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya dengan Negara Indonesia terkait berbagai hal yang menjadi isu-isu penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Ini merupakan bagian dari upaya untuk banyak bertemu dan berbicara, supaya kalau ada salah paham bisa diluruskan dan diklarifikasi. Itu sebabnya pertemuan ini kita hargai. Mereka yang minta dan mereka yang datang, kita hormati sebagai tamu tentunya. Saya juga sempat ceritakan tentang basis-basis dari hubungan akrab antara kita (Indonesia) dengan China,” jelas Fahri

usai menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia H.E. MR. Xiao Qian di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

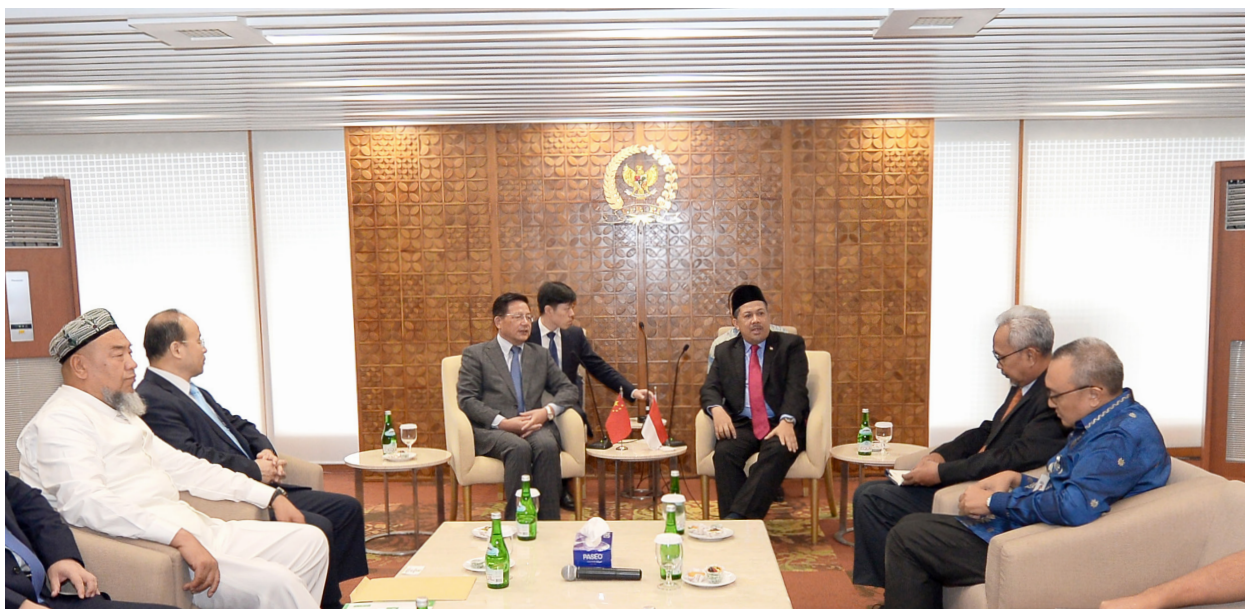
Itulah sebabnya DPR mendukung segala bentuk komunikasi dengan berbagai pihak, sambungnya. Fahri berharap dengan adanya pertemuan tersebut nantinya dapat membawa informasi dan saling pemahaman yang baik diantara kedua negara.

“Saya memang mengingatkan bahwa China itu kita kenal melalui teks-teks lama yang kesannya positif, seperti tuntutan ilmu hingga ke negeri China. Juga sejarah tentang Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Semua adalah kisah positif. Kita harus beritahu ke mereka supaya mengembangkan diplomasi dengan *platform* seperti itu, agar lebih positif dan bisa menjelaskan apa yang dianggap oleh dunia lain sebagai suatu

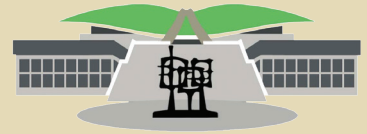
persoalan,” tandas Fahri.

Fahri mengatakan, dirinya mengkritik kalau hubungan antara Indonesia dengan negara-negara seperti China menyempit hanya sebatas persoalan ekonomi saja. Padahal, seharusnya hal itu bisa ditingkatkan sebagai diplomasi budaya, diplomasi untuk perdamaian, serta diplomasi yang lebih luas cakupannya dan lebih luhur nilainya.

“Jangan dipersempit. Lelah kita kalau bicara soal ekonomi terus-menerus. Padahal, ada isu-isu lain yang cukup memprihatinkan untuk kita beri perhatian, soal manusia, kebudayaan, kebebasan dan lain sebagainya. Kita di DPR menjelaskan hal-hal yang mungkin dari Eksekutif tidak pernah mereka dengar. Oleh karenanya, kita mendorong supaya ada keterbukaan komunikasi agar tidak terjadi salah paham,” pungkasnya. ■ dep/es



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia H.E. MR. Xiao Qian. Foto: Eka Andri/OD



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan DPRD Provinsi Papua Barat di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Foto: Jaka/Od



Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora dipimpin Ketua Komisi X Djoko Udjianto di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Rabu (18/6/2019). Foto: Azka/Od



Badan Legislasi DPR RI Rapat Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana dengan para Tenaga Ahli Baleg dipimpin Wakil Ketua Baleg Sudiro Asno, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Foto: Gerald/Od

